

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN DI KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2018-2020

Oleh : Bulyah Santoso

Email : bulyahsantoso@gmail.com

Pembimbing : Dr. Auradian Marta,S.IP.,MA.

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax.

0761-63277

Abstract

The Agricultural Technology Application Program is one of the program policies of the Department of Food and Agriculture Security of Rokan Hilir Regency which aims to provide agricultural facilities and infrastructure to increase agricultural productivity in increasing self-sufficiency in agriculture. The problem in this research is that the implementation of the Agricultural Technology Program Policy has not been maximized due to several factors that support the performance of the policy implementation not being achieved. The purpose of this study was to determine the Implementation of Agricultural Technology Application Program Policies in the District of Parit Aman in Bangko District, Rokan Hilir Regency in 2018-2020.

The approach used in this study is a qualitative approach. This type of research is descriptive. There are two types of data in this study, namely primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews, observations and documentation as well as data analysis techniques in this study were qualitative.

The result of this study is that the implementation of the Agricultural Technology Application Program Policy in the Penghuluan Parit Aman District, Bangko District, Rokan Hilir Regency in 2018-2020 has not been optimal, this is because there are several important dimensions that affect the performance of policy implementation that has not run optimally, namely the dimensions of resources and communication between organization.

Key word : *Implementation, Policy, Agricultural Program*

PENDAHULUAN

Pertanian adalah seluruh kegiatan meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. (Permentan 72 Tahun 2011) Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, hal ini di pengaruhi oleh banyak faktor seperti hasilnya yang berlimpah ketika panen, makanan pokok masyarakat Indonesia, banyak lahan pertanian di perkampungan masyarakat dan merupakan peninggalan nenek moyang. Maka dari itu sektor pertanian ini menjadi fokus negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang penting dalam yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap-3 Tahun 2015-2019. poin pembangunan nilai ekonomi nasional. Peran strategis dari sektor pertanian tersebut dapat digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, dan sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, serta membantu dalam menyerap banyak tenaga kerja. Masyarakat yang bekerja disektor pertanian tergolong banyak yaitu sebanyak 39,68 juta orang atau sekitar 31,86 persen dari jumlah penduduk Indonesia bekerja yang jumlahnya 124,54 juta orang. (Tempo.co, 14 Agustus 2020)

Salah satu Kabupaten di Provinsi Riau Sebut saja Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Rokan Hilir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis

berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Lebih dari 50 % perekonomian di daerah Kabupaten Rokan Hilir bersumber pada bidang atau sektor pertanian. (DPMPTSP Riau, 14 Agustus 2020) sektor pertanian tersebut juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir. Pemenuhan dari kebutuhan dasar ini merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang telah di jamin oleh Undang-Undang Dasar guna mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Hal Ini merupakan fokus di bidang pembangunan pertanian nasional dari masa penjajahan dahulu hingga masa reformasi sekarang. (Pasandaran, 2015:3)

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) berupaya untuk meningkatkan swasembada pangan dengan cara berupaya untuk memenuhi kebutuhan petani, dan menyalurkan program-program kepada masyarakat yang bekerja atau bermata pencaharian sebagai petani yang mana masyarakat petani ini tergabung dalam Gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan Kelompok tani (Poktan) yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 diketahui bahwa Gabungan kelompok tani terbanyak ada di Kecamatan Rimba Melintang yaitu sebanyak 17 Gapoktan, sedangkan yang paling sedikit ada di kecamatan Rantau Kopar yaitu tidak ada sama sekali. Kecamatan Bangko sendiri berada di Ibukota Kabupaten Rokan Hilir, yaitu Bagansiapiapi. Meski berada di Ibu Kota, Kecamatan Bangko memiliki jumlah Gabungan kelompok tani (Gapoktan) terbanyak kedua di Kabupaten Rokan Hilir. Fungsi Gapoktan adalah untuk mengakomodir keperluan masyarakat petani yang tergabung dalam Gapoktan atau poktan itu sendiri

Tabel 1
Produksi Padi di Kabupaten Rokan Hilir
(Ton)

Tahun		
2017	2018	2019
60.408	58.236	56.330

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir, 2019

Berdasarkan tabel diatas, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyadari adanya penurunan produksi padi, hal ini berbanding terbalik dengan visi dan misi dari Kabupaten Rokan Hilir tentang pertanian di kabupaten Rokan Hilir. Masyarakat dan pemerintah pun berharap bahwa sumber daya pertanian atau penghasilan padi para petani meningkat tiap tahunnya, tetapi faktanya adalah sumber daya pertanian tersebut menurun, maka dari itu perlu suatu program untuk mengatasi hal tersebut oleh Organisasi Perangkat Daerah Terkait.

Tentu saja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah terdapat permasalahan yang timbul dan harus di hadapi. Masalah yang timbul ini mempengaruhi hasil yang ingin di capai dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Rokan Hilir. Salah satu masalah tersebut adalah kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai dan penerapan teknologi pertanian yang masih rendah. Maka dari itu diperlukan suatu program yang bisa mengatasi masalah tersebut.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir memiliki beberapa pogram yang sudah tercantum jelas dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang mana renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini tentu saja harus sesuai dengan

Visi Kabupaten Rokan Hilir yaitu “*Terwujudnya Kawasan Sentra Industri Berbasis Agribisnis yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan menuju Masyarakat Rokan Hilir yang Mandiri dan Sejahtera*”. Maksud dari berkelanjutan ini dapat diartikan sebagai kegiatan bidang pertanian yang memanfaatkan sumberdaya lingkungan secara baik dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis dengan menggunakan sumberdaya yang terbarukan. Sedangkan maksud dari mandiri dan sejahtera adalah sebagai tujuan akhir bidang pertanian yang profesional dan mandiri sehingga terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Kegiatan pada Program Penerapan Teknologi Pertanian diatas memiliki tujuan untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana pertanian guna meningkatkan sumber daya pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani serta meningkatnya penerapan teknologi pertanian pada petani.

Program ini memiliki dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan data di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kabupaten Rokan Hilir luas lahan pertanian yang non irigasi adalah seluas 301,889 ha dan seluas 2,532,167 ha untuk Kecamatan Bangko.

Salah satu bentuk dari pengadaan sarana dan prasarana itu adalah masyarakat petani membutuhkan sumur bor untuk perairan persawahan jikalau musim kemarau datang nantinya. Salah satu pembangunan sumur bor tersebut adalah di Gapoktan Usaha Maju, Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir yang dibangun menggunakan DAK tahun 2018. Jarak dari Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir ke ibukota Kecamatan Bangko adalah 3,1 km atau kurang lebih 6 menit perjalanan menggunakan sepeda motor. Lokasi

pertanian di Kecamatan Bangko adalah memusat.

Pembangunan sumur bor dalam Program Penerapan Teknologi Pertanian diharapkan dapat menjadi penyelesaian masalah masyarakat pertanian di musim kemarau. Akan tetapi fakta dilapangan, sumur bor yang diharapkan bisa berguna untuk masyarakat pertanian pada musim kemarau tidak terpakai sama sekali, sehingga ini menjadi suatu permasalahan. Padahal sumur bor ini sudah dibangun pada tahun 2018 lalu di Gapoktan Usaha Maju Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir, tetapi tidak terpakai sampai sekarang. Bahkan sudah dimuat dihalaman berita *pantauriau.com* yang di posting pada 23 september 2019 lalu.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Penerapan Teknologi Pertanian di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2020 ?

TUJUAN & MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Program Penerapan Teknologi Pertanian di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2020 ?

Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan terhadap pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan tentang Implementasi kebijakan
- b. Manfaat Praktis, sebagai masukan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kabupaten Rokan Hilir sebagai bahan Evaluasi dari Implementasi Kebijakan Program Tersebut.

KERANGKA TEORI

Teori Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn (1975)

Berdasarkan teori Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang biasa disebut dengan *A Model of The Policy implementation*, terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, diantaranya adalah sebagai berikut:(Agustino,2016:133)

a). Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Variabel ini biasanya didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor –faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Ukuran-ukuran dasar dari suatu kebijakan serta tujuan-tujuan kebijakan tersebut berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan kebijakan secara menyeluruh.

b). Sumber Daya

Memanfaatkan sumber daya merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan. Karena tahap-tahap tertentu dari proses implementasi secara keseluruhan menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas tetapi tetap dengan pekerjaan yang sudah di persyaratkan oleh suatu kebijakan. Tidak hanya di sumber daya manusia, sumber daya lain mesti diperhatikan demi keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan.

c). Karakteristik Badan Pelaksana

Dalam hal ini Van Meter dan Van Horn (1975) mengartikan struktur birokrasi sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma serta pola-pola hubungan berulang-ulang yang terjadi dalam badan eksekutif yang memiliki berbagai hubungan dengan

yang menjalankan kebijakan. Dalam karakteristik badan pelaksana ini Van Meter dan Van Horn (1975) mengedepankan beberapa unsur yang sekiranya berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan yaitu Kompetensi dan ukuran staf suatu badan, tingkat Pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-inti dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana

d). Sikap/ Kecenderungan Badan pelaksana

Van Meter dan Van Horn (1975) memiliki pendapat bahwa komponen dari model yang dijelaskan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan atau dibuat. Setelah itu barulah mengidentifikasi tiga unsur yang mempengaruhi keinginan atau kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yaitu kognisi atau pemahaman tentang kebijakan, penerimaan atau penolakan terhadap tanggapan dan intensitas tanggapan tersebut.

e). Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Tujuan dan ukuran yang sudah dipahami oleh individu-individu akan menghasilkan implementasi yang efektif. Itu semua dapat terwujud apabila diberikan perhatian yang besar tentang kejelasan tentang ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan, komunikasi yang baik dengan pelaksana kebijakan dan kesesuaian ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dijalankan dengan yang telah ditetapkan. Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan bahwa implementasi yang efektif ditentukan dari seberapa bagus dan konsistennya mengomunikasikan tentang ukuran dan tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka sedikit kesalahan yang terjadi dalam

pelaksanaan implementasi tersebut, begitu juga dengan sebaliknya.

f). Lingkungan sosial

Sejauh apa lingkungan eksternal mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan merupakan hal terakhir yang diperhatikan guna untuk menilai kinerja implementasi publik dalam perpektif Van Meter dan Van Horn (1975). Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kurang kondusif dapat menjadi hal utama kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Penerapan Teknologi Pertanian Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2020 ?

Penelitian ini membahas tentang implementasi Kebijakan Program Penerapan Teknologi Pertanian di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

Pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nilai ekonomi nasional. Program yang termasuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini merupakan bagian dari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir tentang Revisi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis ini memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016-2021 yang mana bertujuan untuk meningkatkan sumber daya pertanian atau hasil dan kesejahteraan petani dengan dengan salah satu cara yaitu meningkatkan penggunaan dari teknologi pertanian tersebut.

Tabel 2
Data Kegiatan Program Penerapan
Teknologi Pertanian di Kecamatan
Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2018

N o	Nama Kegiat an	Nama Desa	Jmlh	Anggaran (Juta)
1	Pompa	Parit	1	6,83
2	Sumur Bor	Bagan Jawa Pesisir	1	297

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ROHIL, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kegiatan dari program penerapan teknologi pertanian yang dijalankan pada tahun 2018 berjumlah dua jenis kegiatan yang tersebar di Kecamatan Bangko.

Tabel 3
Data Kegiatan Program Penerapan
Teknologi Pertanian di Kecamatan
Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2019

N o	Nama Kegiat an	Nama Desa	Jml h	Anggara (Juta)
1	Hand Traktor	Bagan Jawa Pesisir	1	40,06
2	Pintu Air	Bagan Jawa Pesisir	3	89,98
3	Rehabi litasi Jaringa	Bagan Jawa Pesisir	200 Ha	240

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ROHIL, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat program penerapan teknologi pertanian di Kecamatan Bangko menjalankan tiga kegiatan pada tahun 2019 yaitu *Hand*

Traktor dan Pintu Air, yang mana pada tahun ini di Kecamatan Bangko menurun dari tahun sebelumnya.

Tabel 4
Data Kegiatan Program Penerapan
Teknologi Pertanian di Kecamatan
Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2020

N o	Nama Kegiata n	Nama Desa	Jmlh	Anggaran (Juta)
1	Long Storage	Parit Aman	8,035 m3	113,4
2	Long Storage	Bagan Jawa Pesisir	-	-
3	Long Storage	Serusa	8,035 m3	113,4
4	Embung	Serusa	1 Unit	115,5

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ROHIL, 2020

Dibandingkan ditahun sebelumnya, berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya kegiatan program penerapan teknologi pertanian mengalami peningkatan yang itu sebanyak empat kegiatan yang dilaksanakan. Ditahun ini terfokus pada pembuatan long storage dikarenakan di tahun 2020 air pasang sangat tinggi dan menyebabkan banjir.

Berdasarkan tiga tabel kegiatan program penerapan teknologi pertanian diatas dapat diketahui tentang kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir di Kecamatan Bangko. Maka dari itu peneliti akan membahas tentang bagaimana implementasi program penerapan teknologi pertanian di Kecamatan Bangko menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1975).

Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Variabel-variabel tersebut antara lain sebagai berikut :

A. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) bisa diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran serta tujuan dari kebijakan tersebut memang realistis dengan sosio kultur yang ada di tingkat pelaksana kebijakan.

1. Ukuran Kebijakan

Ukuran Kebijakan adalah beberapa indikator yang dapat dikatakan berhasilnya pelaksanaan suatu kebijakan. Indikator tersebut antara lain, *Pertama*, banyak kelompok pertanian yang telah dijangkau. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat diketahui fakta dilapangan bahwa program ini telah sampai ke kelompok yang membutuhkan yaitu masyarakat tani. Petani yang mendapatkan program tersebut haruslah yang sudah tergabung dalam Kelompok tani atau Gabungan kelompok tani serta terdeteksi pada Sistem Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir. Keuntungan setelah terdaftar di Gapoktan atau Poktan adalah ketika mengajukan permohonan bantuan. Untuk mengajukan permohonan suatu bantuan tidak bisa asal minta saja, tetapi dengan proses yang jelas sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan menjangkau Kelompok tani yang tergabungan juga dalam Gabungan Kelompok Tani. Serta tidak jauh berbeda jangkauan program yang telah di

distribusikan di kelompok tani masing-masing Gapoktan, dimana untuk mendapatkan program harus melaporkan atau memberitahukan terlebih dahulu ke Ketua Gapoktan untuk selanjutnya di kumpulkan baru kemudian dilaporkan ke Dinas dalam bentuk proposal.

Kedua, mudahnya pengajuan program yang dijangkau. Selanjutnya, perlu diketahui juga bagaimana proses pengajuan bantuan atau program tersebut. Untuk mengajukan bantuan tentunya diperlukan alur yang jelas dalam menghasilkan atau membentuk satu program. Untuk lebih jelasnya, dalam pengajuan usulan yang diperoleh dari setiap bidang, kemudian diusulkan dan diproses oleh Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. Apabila usulan tersebut telah di usulkan maka dikembalikan lagi ke bidangnya masing-masing. Sehingga dengan adanya alur proses pengajuan program yang jelas ini, membuat jangkauan pengajuan program menjadi lebih mudah karena lebih terarah dan lebih pasti alurnya. Hal ini akan dapat terwujud apabila alur tersebut di pahami oleh ketua Gapoktan.

Ketiga, pemahaman pelaksana kebijakan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan badan pelaksana kebijakan tentunya terlebih dahulu paham dengan program kerja yang dibuat dan akan dilaksanakan. Sehingga pemahaman *stakeholder* mempengaruhi pelaksanaan dan implementasi program. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* dalam hal ini badan pelaksana kebijakan, memahami tentang program yang akan dilaksanakan dalam hal ini program penerapan teknologi pertanian. Program yang akan dilaksanakan merupakan tujuan bersama serta perwujudan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian itu sendiri.

2. Tujuan Kebijakan

Program Penerapan Teknologi Pertanian memiliki tujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan Swasembada Pertanian

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap dengan adanya program ini, menjadikan Kabupaten Rokan Hilir yang surplus swasembada pangan bidang pertanian. Maka dari itu stakeholders sudah mengetahui dan memahami tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan swasembada pertanian

- Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian membuat Program tentunya memiliki tujuan untuk meningkatkan sumber penghasilan pertanian dan tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Jika petani sejahtera, maka hasil pertanian pun akan meningkat. Namun dalam mencapai tujuan itu terdapat kendala sehingga mengganggu proses implementasi program tersebut.

- Menerapkan Teknologi Pertanian

Penerapan teknologi pertanian menjadi kunci dari meningkatnya kesejahteraan petani dalam meningkatnya hasil pertanian. Dimasa yang serba canggih sekarang, teknologi sudah merambah ke berbagai bidang, tidak luput juga dalam bidang pertanian. Maka dari itu program penerapan teknologi pertanian ini memiliki salah satu tujuan yaitu meningkatkan penerapan teknologi pertanian pada petani.

B. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi implementasi program, karena keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan suatu program. Sumber daya yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah adalah Sumber Daya

Manusia, dimana sumber manusia dalam program ini adalah Penyuluh Pertanian Lapangan dan petani yang tergabung dalam Kelompok tani atau Gabungan kelompok tani.

Penyuluh Pertanian Lapangan merupakan penyuluh yang bertugas untuk melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi pertanian kepada masyarakat atau petani yang tergabung dalam Kelompok tani dan Gabungan kelompok tani. Penyuluh pertanian ini sangat penting sebagai penyalur informasi dan edukasi kepada masyarakat petani.

Tabel 5

Jumlah Penyuluh Pertanian di Kabupaten Rokan Hilir

No	Jenis Penyuluh	Pendanaan	Jumlah (Orang)
1	PNS	APBN	25
2	Tenaga Harian lepas Tugas Bantuan	APBN	11
3	Tenaga Harian Lepas Daerah	APBD	32
4	Penyuluh Swadaya	APBD	3
Total			71

Sumber : Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ROHIL, 2020

Berdasarkan tabel 1.6 diatas dapat diketahui jumlah dari penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Penyuluh Pertanian Lapangan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas Tugas Bantuan yang sumber pendanaannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Tenaga Harian Lepas Daerah yang sumber pendanaannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) serta Penyuluh Swadaya dari masyarakat atau tokoh masyarakat yang dianggap mampu

dan sanggup untuk menjalani tugas sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, diketahui bahwa idealnya satu balai penyuluh pertanian yang terdiri dari kordinator penyuluh pertanian membawahi satu kecamatan dan satu penyuluh pertanian lapangan membawahi satu desa, tetapi fakta dilapangan adalah jumlah dari Tenaga penyuluh dalam hal ini Balai Penyuluh Pertanian dan juga kordinator penyuluh pertanian kekurangan sumber daya manusia sehingga koordinasi dan tugas serta fungsi dari Penyuluh Pertanian Lapangan yang telah diamanat oleh Undang-Undang Nomor 09 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak berjalan dengan maksimal.

Selain Penyuluh Pertanian Lapangan, Sumber Daya yang lainnya adalah Kelompok tani. Kelompok tani adalah organisasi atau kelompok yang menaungi petani, petani yang masuk kedalam kelompok tani akan memiliki kemudahan dalam pengajuan bantuan, pembinaan dari pemerintahan dan pemetaan petani.

Petani ini tidaklah bergerak sendiri tetapi tergabung dalam kelompok tani. Untuk lebih jelasnya

Untuk membentuk kelompok tani atau gabungan kelompok tani haruslah mempunyai sumber daya manusia yang cukup yaitu dalam hal ini masyarakat petani. Diketahui untuk membentuk kelompok tani syaratnya adalah dua puluh sampai tiga puluh orang, sedangkan untuk membentuk gabungan kelompok tani minimal terdiri dari tiga kelompok tani atau poktan.

C. Karakteristik Badan Pelaksana

Organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik menjadi pusat perhatian paada agen

pelaksana. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak di pengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksannaya. Van Meter dan Van Horn (1975) mengetengahkan beberapa unsur yang sekiranya dapat berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam pengimplementasian kebijakan atau program yang telah peneliti sesuaikan berdasarkan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan

- Kemampuan staf yang progresif

Dalam implementasi kebijakan kendatinya tidak lepas dari interaksi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Dalam proses tersebut dibutuhkan staf yang progresif supaya kinerja program dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dimaksudkan supaya arah atau tujuan program dapat mencapai ke angka yang memuaskan karena dengan didorong dan di dukung oleh staf yang progresif maka hasil program dapat berjalan dengan optimal.

- Kemampuan Staf yang Disiplin terhadap program

Maksud dari kedisiplinan pegawai atau staf badan pelaksana adalah pegawai atau staf di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir adalah kedisiplinan staf dalam pelaksanaan program.

2. Tingkat pengawasan hirarkis dan proses - proses dalam badan-badan pelaksana

Unsur berikutnya yang mempengaruhi dimensi karakteristik badan pelaksana adalah Tingkat pengawasan hirarkis dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana. Pengawasan hirarkis disini adalah bagaimana bentuk pengawasan dan peran dari pimpinan badan pelaksana dalam

hal ini Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir maupun yang tingkatan pelaksana yang berada dibawahnya. Tingkat pengawasan hirarkis yang baik adalah berperannya pengawasan Kepala Dinas dalam peningkatan kinerja terhadap proses-proses pelaksanaan program dari badan pelaksana.

Dalam pelaksanaan program penerapan teknologi pertanian memiliki bidang-bidang atau seksi yang sudah di bagi sesuai kebutuhan atau tupoksi. Peran Kepala Dinas dalam hirarkis pengawasan telah menunjukkan adanya bukti keberhasilan terhadap unsur ini. Tidak hanya dalam bentuk pengawasan saja tetapi juga dengan menekankan pada peningkatan semangat dan motivasi kepada para badan pelaksana.

D. Sikap/ Kecenderungan Badan Pelaksana

Keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan akan di pengaruhi oleh sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana. Maka perlu disaring persepsi-persepsi pelaksanan dalam yuridiksi dimana suatu kebijakan itu dihasilkan.

Van Meter dan Van Horn (1975) menyebutkan ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan dari suatu kebijakan cenderung di tolak oleh pelaksanan atau orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi dari kebijakan tersebut, yaitu : tujuan-tujuan kebijakan yang telah di putuskan atau ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan nilai pribadi para pelaksana kegiatan atau program, loyalitas yang berlebihan terhadap organisasi, perasaan kepentingan pribadi atau adanya hubungan-hubungan yang disenangi dan disegani.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah tiga unsur tanggapan pelaksana yang

mempengaruhi kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan kebijakan atau program yaitu sebagai berikut :

1. Pemahaman tentang kebijakan

Bupati sebagai kepala daerah memiliki keinginan untuk menjadikan Kabupaten Rokan Hilir sebagai lumbungnya pertanian yang tersirat di dalam visi dan misi Bupati Kabupaten Rokan hilir. Dapat diketahui bahwa pegawai atau staf di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir sudah memahami program ini, yang paling utama adalah tentang tujuan dari dilaksanakannya program ini. Serta tugas pokok dan fungsi masing masing bidang atau kepala seksi yang saling bersinergi sehingga program ini dapat dilaksanakan.

Tidak hanya kepala dinas tetapi struktur dibawahnya yaitu kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi juga memahami kebijakan atau program yang dijalankan, dapat dilihat dari rutinitas dan konsistensi terhadap program yang dilaksanakan serta standar pekerjaan yang laksanakan. Dengan demikia, dapat disimpulkan bahwa badan pelaksana dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir memahami secara keseluruhan program atau kebijakan yang dijalankan.

Pemahaman terhadap program ini juga berlaku untuk seksi atau yang setaranya terhadap program. Sehingga seksi pengairan dan irigasi, alsintan dan penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir juga memahani program yang dilaksanakan, dilihat dari fokus pelaksanaan yaitu mengutamakan program yang sudah termasuk kedalam rencana strategis atau program yang sudah di tetapkan.

2. Tanggapan Kebijakan

Unsur berikutnya adalah tanggapan pelaksana. Program ini didukung penuh oleh seluruh staf atau pegawai di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selalu

bersinergi dengan tugas pokok dan fungsinya. Artinya seluruh staf dan pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir menyatukan berbagai persepektif dan pendapat untuk mensukseskan program ini. Hasil observasi yang peneliti lakukan di

Tanggapan yang positif tidak hanya di representasikan oleh staf di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tetapi juga oleh salah satu petani di Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir dan Parit Aman yang terbantu oleh adanya beberapa kegiatan program penerapan teknologi pertanian sehingga memberikan respon dan tanggapan yang positif.

3. Intensitas Tanggapan

Sebelumnya sudah dibahas tentang pemahaman badan pelaksana dan tanggapan pelaksana. Selanjutnya, intensitas tanggapan dari pelaksana program. Disimpulkan bahwa adanya dukungan yang cukup tinggi dari setiap pegawai atau staf yang ikut memberikan kontribusi untuk mensukseskan program ini, sigap dengan keadaan situasi dan kondisi sehingga bisa menyesuaikan program tersebut dengan keadaan dilapangan.

E. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dalam kinerja Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), salah satu dimensi yang memberikan pengaruh paling besar dalam kinerja implementasi kebijakan adalah komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Implementasi Kebijakan. Implementasi ini akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami dan dimengerti oleh pelaksana atau individu-individu yang bertanggung jawab terhadap kebijakan

tersebut. Oleh sebab itu, pentingnya untuk memberikan kejelasan dari ukuran-ukuran serta tujuan-tujuan kebijakan, komunikasi yang tepat dengan para pelaksana.

Van Meter dan Van Horn (1975) mengatakan bahwa prospek-prospek tentang implementasi yang paling efektif ditentukan dari kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh konsistensi dan ketepatan mengomunikasikan program tersebut. Semakin bagus koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka perkiraan terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, begitu pula sebaliknya.

Komunikasi yang penulis singgung adalah komunikasi antara Gabungan kelompok tani dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir. Penulis menyimpulkan bahwa komunikasi dari Gapoktan dan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian belum berjalan dengan baik, dilihat dari respon pemerintah daerah yang cenderung lambat dalam memproses suatu pengaduan atau permintaan dari masyarakat petani. Hal ini dilihat dari lamanya proses pengajuan proposal. Ditambah lagi tidak adanya bentuk pemberitahuan atau balasan dari Dinas sehingga membuat masyarakat petani menunggu lebih lama. Penulis mengetahui bahwa tidak teratur atau kurangnya intensitas Penyuluh Pertanian Lapangan turun ke pertanian, yaitu tiga hari sekali sampai dengan seminggu sekali. Idealnya yang disampaikan oleh Administrator Sistem Penyuluh Pertanian, penyuluh pertanian diharuskan menuliskan jurnal di buku ppl setiap hari atau satu halaman perhari, artinya ppl harus mengecek minimal untuk melihat situasi saja yaitu setiap hari.

Didalam internal penyuluhan sendiri, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memiliki yang namanya seksi Penyuluhan

yang dipimpin oleh Kepala seksi penyuluhan. Komunikasi di dalam internal penyuluhan berjalan dengan baik, dalam internal penyuluhan juga memiliki alur komunikasi yang jelas mulai dari penyuluh hingga ke BPP atau Balai Penyuluh Pertanian sehingga tidak tumpang tindih antar penyuluhan.

3.6 Lingkungan Sosial

Hal terakhir yang diperhatikan dalam menilai kinerja implementasi kebijakan dalam perpektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut menunjang keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Faktor eksternal yang mendorong keberhasilan dari kebijakan publik adalah lingkungan sosial.

Faktor lingkungan sosial selalu menjadi suatu dimensi yang paling umum yang ikut serta mempengaruhi implementasi kebijakan. Lingkungan sosial memiliki salah satu instrumen yaitu masyarakat. Masyarakat dalam penelitian ini terkhusus adalah masyarakat petani yang tergabung dalam kelompok tani atau Gabungan kelompok tani.

Masyarakat petani terkadang datang ke kantor dinas yang tentu saja didampingi oleh ketua Gabungan kelompok tani atau ketua Kelompok tani untuk menanyakan tentang kejelasan program dan syarat-syarat apa yang diperlukan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari Implementasi Kebijakan Program Penerapan Teknologi Pertanian Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Program Penerapan Teknologi Pertanian di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018-2020 menggunakan Enam dimensi implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, sikap atau kecenderungan agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan sosial. Berdasarkan keseluruhan dimensi tersebut terlihat bahwa penelitian secara fisik terhadap implementasi program belum optimal, dikarenakan ada beberapa dimensi yang kurang berjalan dengan baik.
2. Dimensi yang memegang peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi Implementasi Program tersebut yaitu dimensi sumber daya manusia dan komunikasi antar organisasi. Hal inilah yang menyebabkan menurunnya produksi padi di Kabupaten Rokan Hilir. Tetapi, dilain hal penelitian melihat pencapaian program dari sebelum dan sesudah adanya program sudah ada sedikit peningkatan yang dapat dilihat dari program yang sudah di distribusikan kepada masyarakat petani melalui gabungan kelompok tani atau yang langsung turun kelapangan.

Saran

Untuk melengkapi hasil penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran sehubungan dengan permasalahan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian perlu mengevaluasi kinerja terhadap program penerapan teknologi pertanian supaya kendala-kendala yang sudah terjadi sebelumnya dapat teratasi apabila terjadi di periode berikutnya.
- b. Penyuluh pertanian lapangan perlu meningkatkan komunikasi antar

- organisasi yang terlibat dalam program tersebut, yaitu untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir, Camat Bangko, Desa atau kepenghuluan dan masyarakat petani baik Gabungan kelompok tani atau pun kelompok tani.
- c. Gabungan kelompok tani maupun kelompok tani perlu lebih intensif dalam menyerap atau melaporkan segala keadaan atau keluhan dari masyarakat petani, sehingga kendala di lapangan cepat terselesaikan.
 - d. Masyarakat petani pun perlu ikut berpartisipasi dalam mengadu keluhan atau pun kendala yang dijumpai di lapangan sehingga gabungan kelompok tani atau pun kelompok tani, dapat segera berkoordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan.
 - e. Perlunya kajian ulang dalam menjalankan program penerapan teknologi pertanian oleh setiap pelaksana program yang terlibat dengan melihat berbagai macam aspek seperti sumber daya manusia, pemahaman terhadap program, partisipasi masyarakat terhadap program, dan faktor alam yang turut diperhitungkan

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*, Cetakan Keenam. Bandung: Alfabeta.
- Bafdal, N. (2012). *Pengantar Teknologi Industri Pertanian*. Bandung: Unpad Press.
- Chika, Z.L., Basri, M., & Aminuddin. (2020). Implementasi Program Sertifikasi pendaftaran sistematis lengkap di Kelurahan Gunung Jati Kota Kediri. *Journal Publicuho*, Vol 3, No 1.
- Khairi, A., & Amin. (2018). Implementasi Program Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017. *JOM FISIP Vol 5*, Edisi II.

- Kencana, I. (2015). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution. (2011). *Metode Research*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Pasandaran, E. (2015). *Memperkuat Kemampuan Swasembada Pangan*. Jakarta : IAARD Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utomo, W. (2015). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan perumahan Kota Banjarbaru. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi publik JKAP*. Volume 19. No 1.
- Widodo, J. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Sidoarjo: Bayumedia Publishing.

Peraturan dan Media :

- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 42/permentan/RC.20/11/2017 tentang perubahan atas peraturan menteri pertanian nomor 09/permentan/RC.20/3/2016 tentang Rencana Strategi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019
- Keputusan Kepala Nomor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir Nomor 521/DKPP/2019/VII.09 tentang Revisi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016-2021
- DPMPSTSP Riau. (2019). *Potensi Investasi Provinsi Riau*. (<http://Storymaps.arcgis.com/stories/c07d51b78bd94a658295>)

17789a81568c). Diakses pada 14 Agustus 2020

Pantauriau.com. (2019). Dinas Pertanian Rohil Bangun Sumur Bor Gapoktan Sumber Rezeki disinyalir Tidak Tepat Sasaran. (<http://pantauriau.com/mobile/detailberita/136050/dinas-pertanian-rohil-bangun-sumu-bor-gapoktan-sumber-rezeki-disinyalir-tidak-tepat-sasaran>) Diakses pada 15 Agustus 2020

Tempo.co, (2017). *Sektor Pertanian Serap Banyak Tenaga Kerja*. (<http://bisnis.tempo.co/read/872715/februari-2017-sektor-pertanian-serap-banyak-tenaga-kerja/full?view=ok>). Diakses pada 14 Agustus 2020.